
Peran Kebijakan Publik Dalam Mengurangi Angka Pengangguran Didiera

Erfain^{1*}

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Author Correspondence. Email: erfain79@gmail.com Phone: +6285299587997

Abstract : *Unemployment remains a major social and economic challenge in regional development in Indonesia. High unemployment can contribute to poverty, social inequality, and declining community productivity. This study aims to analyze the role of public policy in reducing regional unemployment and identify factors affecting policy implementation. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through a literature review of scientific journals, books, government documents, and other relevant sources. Data were collected through documentation and literature studies and analyzed descriptively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that job training, Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) development, regional investment, and labor-intensive programs contribute to expanding employment opportunities and strengthening community economic capacity. Job training improves workforce competencies according to labor market needs, while MSME development and regional investment encourage the creation of new employment opportunities. However, policy implementation continues to face challenges, including limited budgets and facilities, weak inter-agency coordination, targeting problems, and mismatches between workforce competencies and labor market demands. Therefore, stronger collaboration among government institutions, the private sector, educational institutions, and communities is needed through needs-based planning, competency development, and continuous monitoring and evaluation to ensure that unemployment reduction policies are effective, targeted, and sustainable.*

Keywords: *Public Policy, Unemployment, Employment, MSMEs, Regional Investment, Labor-Intensive Programs.*

Abstrak: Pengangguran merupakan salah satu permasalahan sosial dan ekonomi yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan daerah di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan penurunan produktivitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mengurangi angka pengangguran di daerah serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah, dan berbagai referensi relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelatihan kerja, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan investasi daerah, serta program padat karya berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, koordinasi antarlembaga, ketepatan sasaran, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui perencanaan berbasis kebutuhan, penguatan kompetensi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan pengurangan pengangguran dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pengangguran, Ketenagakerjaan, UMKM, Investasi Daerah, Padat Karya.

1. PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan daerah. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dapat meningkatkan jumlah pengangguran serta berdampak pada pendapatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga dengan kualitas sumber daya manusia, struktur ekonomi, investasi, tingkat pendidikan, dan kondisi pasar kerja pada masing-masing wilayah. Saragi dan Sihombing (2024) menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi dan ketenagakerjaan, sehingga pengurangan pengangguran membutuhkan intervensi kebijakan yang mempertimbangkan berbagai faktor secara simultan. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena kebijakan yang dirumuskan dapat memengaruhi penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal.

Kebijakan publik memiliki hubungan langsung dengan upaya pengurangan pengangguran karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator penciptaan kesempatan kerja dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kebijakan ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan investasi, serta program penciptaan kerja yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Setiawan dan Hikmah (2025) menunjukkan bahwa penanganan pengangguran memerlukan kebijakan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mengintegrasikan berbagai instrumen pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah program yang dilaksanakan, melainkan berdasarkan kemampuan program dalam menjawab kebutuhan tenaga kerja dan menciptakan peluang kerja yang berkelanjutan.

Pelatihan kerja merupakan salah satu instrumen kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, masyarakat dapat memperoleh keterampilan yang lebih relevan dengan tuntutan pasar kerja. Artanti et al. (2024) menemukan bahwa program pelatihan kerja di Kota Batu berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan peserta dan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam

penanggulangan pengangguran. Temuan Utami dan Zafira (2024) juga menunjukkan pentingnya program pelatihan dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, khususnya pada bidang bisnis dan manajemen. Namun, efektivitas pelatihan sangat ditentukan oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan pasar, ketepatan sasaran peserta, kualitas instruktur, fasilitas, serta tindak lanjut setelah pelatihan. Dengan demikian, pelatihan kerja perlu diposisikan sebagai bagian dari kebijakan ketenagakerjaan yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, bukan sekadar program peningkatan keterampilan.

Selain peningkatan kompetensi tenaga kerja, UMKM memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja dan memperkuat ekonomi lokal. Karakteristik UMKM yang relatif fleksibel dan tersebar di berbagai wilayah memungkinkan sektor tersebut menjadi salah satu sumber penciptaan pekerjaan bagi masyarakat. Hafni dan Rozali (2015) menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Dalam perkembangan ekonomi digital, penguatan UMKM juga semakin berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha memanfaatkan teknologi, memperluas pemasaran, dan meningkatkan produktivitas. Nurfauziah et al. (2024) menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mendukung peningkatan daya saing UMKM melalui perluasan akses pasar. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM dalam konteks pengurangan pengangguran perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan modal, tetapi juga pada pendampingan, peningkatan kapasitas manajerial, digitalisasi, dan perluasan akses pasar agar pertumbuhan usaha dapat menghasilkan tambahan kesempatan kerja.

Instrumen kebijakan lainnya adalah peningkatan investasi daerah. Investasi dapat mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja. Taqiyyuddin (2023) menunjukkan adanya keterkaitan investasi dengan penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan Wahyudi et al. (2023) menunjukkan bahwa investasi merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat regional, Rusdin et al. (2023) juga menemukan bahwa investasi berkaitan positif dengan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi dapat menjadi instrumen penting dalam kebijakan pengurangan pengangguran. Namun, manfaat investasi terhadap masyarakat lokal sangat bergantung pada jenis investasi, struktur sektor ekonomi, kebutuhan tenaga kerja, dan kesiapan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kebijakan investasi perlu

diintegrasikan dengan pengembangan kompetensi tenaga kerja agar peluang kerja yang tercipta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara pelatihan kerja, UMKM, investasi, dan penyerapan tenaga kerja, kajian sebelumnya cenderung menempatkan setiap instrumen kebijakan secara terpisah. Penelitian mengenai pelatihan lebih banyak berfokus pada efektivitas program dan peningkatan keterampilan peserta (Artanti et al., 2024; Utami & Zafira, 2024), sedangkan penelitian mengenai investasi dan penyerapan tenaga kerja lebih menekankan hubungan antarvariabel ekonomi pada wilayah tertentu (Rusdin et al., 2023; Taqiyyuddin, 2023; Wahyudi et al., 2023). Sementara itu, kajian UMKM lebih banyak menyoroti kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan penguatan usaha (Hafni & Rozali, 2015; Nurfauziah et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya **research gap**, yaitu masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan berbagai instrumen kebijakan publik tersebut dalam satu kerangka analisis untuk melihat bagaimana pemerintah daerah menggunakan pelatihan kerja, pengembangan UMKM, investasi, dan program penciptaan kerja secara simultan dalam mengurangi pengangguran, sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasinya.

Research gap tersebut menjadi penting karena keberhasilan pengurangan pengangguran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu program, tetapi juga oleh keterkaitan antarkebijakan dan kualitas implementasinya. Widodo et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, fasilitas, partisipasi masyarakat, serta kebutuhan penguatan monitoring dan evaluasi. Artanti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa ketepatan sasaran menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pelatihan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk melihat kebijakan pengurangan pengangguran secara lebih komprehensif, yaitu tidak hanya dari sisi manfaat masing-masing program, tetapi juga dari sisi keterpaduan kebijakan, kesesuaian dengan kebutuhan daerah, dan hambatan implementasinya.

Berdasarkan research gap tersebut, kebaruan kajian ini terletak pada upaya menganalisis peran kebijakan publik dalam pengurangan pengangguran melalui pendekatan yang terintegrasi dengan menghubungkan empat instrumen utama, yaitu pelatihan kerja, pengembangan UMKM, investasi daerah, dan program padat karya, serta mengkaji kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

Kajian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara statistik, tetapi untuk memberikan pemahaman deskriptif mengenai bagaimana berbagai kebijakan tersebut berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan faktor apa saja yang menentukan keberhasilannya. Kontribusi kajian diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai kebijakan ketenagakerjaan sekaligus memberikan pertimbangan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis peran kebijakan publik dalam mengurangi angka pengangguran di daerah melalui pelatihan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan investasi daerah, dan program padat karya serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Fokus tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara kebijakan publik, peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi daerah. Hasil kajian selanjutnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dan karakteristik ekonomi masing-masing daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran kebijakan publik dalam mengurangi angka pengangguran di daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber secara kontekstual. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang dapat digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam sesuai dengan kondisi yang dikaji (Abdussamad, 2021). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bentuk kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program ketenagakerjaan, serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat upaya pengurangan pengangguran secara sistematis berdasarkan data yang tersedia.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Literatur yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan Badan Pusat Statistik, dokumen pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan terkait ketenagakerjaan. Studi literatur dilakukan dengan mengidentifikasi,

membaca, dan menelaah sumber-sumber ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik, pengangguran, pelatihan kerja, UMKM, investasi, serta penyerapan tenaga kerja. Adlini et al. (2022) menjelaskan bahwa studi pustaka dapat digunakan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber ilmiah sehingga dapat membangun pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian pustaka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari laporan statistik, dokumen pemerintah, regulasi, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan kondisi pengangguran serta program ketenagakerjaan di daerah. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh informasi mengenai bentuk, pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan publik dalam mengurangi pengangguran. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik, kredibilitas sumber, keterbaruan informasi, serta keterkaitannya dengan tujuan penelitian. Waruwu (2023) menegaskan bahwa proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif perlu dilakukan secara sistematis agar informasi yang diperoleh dapat menggambarkan fenomena secara utuh.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu menyeleksi data, mengidentifikasi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema, menginterpretasikan temuan, dan menyusun sintesis hasil penelitian. Data dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan UMKM, investasi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyerapan tenaga kerja. Assyakurrohim et al. (2022) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan dikaji oleh peneliti.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, laporan statistik, dan hasil penelitian terdahulu. Perbandingan sumber dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi serta meningkatkan kredibilitas hasil analisis. Data yang memiliki kesesuaian kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun interpretasi mengenai peran kebijakan publik terhadap pengurangan pengangguran di daerah. Fiantika et al. (2022) menjelaskan bahwa

penelitian kualitatif perlu memperhatikan kredibilitas data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai kebijakan pengurangan pengangguran dan faktor yang memengaruhi efektivitas implementasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Program Pelatihan Kerja Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja

Program pelatihan kerja merupakan salah satu instrumen kebijakan publik yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Pelatihan memberikan keterampilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kesiapan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan. Artanti et al. (2024) menunjukkan bahwa program pelatihan kerja di Kota Batu mampu meningkatkan keterampilan peserta dan memberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan kerja tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kompetensi, tetapi juga dapat menjadi strategi pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan pasar kerja dan mengurangi pengangguran.

Efektivitas program pelatihan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Widodo et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan kerja berbasis kompetensi dapat diarahkan melalui kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan standar kompetensi kerja. Sementara itu, Utami dan Zafira (2024) menemukan bahwa pelatihan bidang bisnis dan manajemen dapat meningkatkan keterampilan masyarakat untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah daerah melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja sebelum menentukan jenis pelatihan. Dengan demikian, pelatihan yang diberikan dapat menghasilkan kompetensi yang relevan, adaptif, dan memiliki nilai ekonomi bagi peserta.

Pelatihan kerja juga dapat dikembangkan untuk mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru. Yuliasuti (2024) menunjukkan bahwa pengembangan tenaga kerja mandiri dapat menjadi salah satu strategi dalam memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan usaha. Selain itu, Efendi (2024) menunjukkan bahwa pelatihan bisnis digital dapat meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan peserta dalam memanfaatkan peluang usaha berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan program pelatihan tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran, tetapi juga membutuhkan pendampingan, akses modal, pemasaran, dan evaluasi pascapelatihan. Integrasi berbagai dukungan tersebut dapat memperkuat dampak pelatihan terhadap peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengurangan pengangguran daerah.

3.2 Pengembangan UMKM Berkontribusi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu strategi penting dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran di daerah. UMKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja karena dapat berkembang berdasarkan potensi ekonomi dan kebutuhan masyarakat lokal. Wangge dan Anggrismono (2024) menunjukkan bahwa jumlah unit usaha, investasi, dan faktor ekonomi lainnya memiliki hubungan positif dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM di Kabupaten Sleman. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan jumlah UMKM dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat UMKM melalui akses pembiayaan, pendampingan, pelatihan, dan kemudahan perizinan.

Selain menciptakan kesempatan kerja, pengembangan UMKM perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan daya saing melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi memungkinkan pelaku UMKM memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan akses konsumen, serta menyesuaikan kegiatan usaha dengan perkembangan ekonomi digital. Nurfauziah et al. (2024) menunjukkan bahwa pendampingan digital melalui program SiBakul Jogja dapat membantu pelaku UMKM mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi dan meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung keberlanjutan usaha sekaligus meningkatkan peluang ekspansi kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan pengembangan UMKM perlu mengintegrasikan pelatihan digital, pemasaran daring, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, kemampuan pengelolaan usaha, akses pasar, dan kapasitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah perlu membangun kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga menyediakan pelatihan,

pendampingan, digitalisasi, dan akses pasar. Setiawan dan Hikmah (2025) menempatkan pengembangan UMKM sebagai salah satu strategi kebijakan publik yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan pengangguran di daerah, bersama dengan pelatihan kerja dan pengembangan investasi industri. Dengan dukungan kebijakan yang terintegrasi, UMKM berpotensi memperkuat ekonomi lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja masyarakat.

3.3 Peningkatan Investasi Daerah Mendorong Terciptanya Lapangan Kerja Baru

Peningkatan investasi daerah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Investasi pada sektor produktif dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas kegiatan usaha, dan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Silalahi et al. (2023) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kota-kota Provinsi Sulawesi Utara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan investasi dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur, kepastian regulasi, dan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki potensi menyerap tenaga kerja.

Investasi juga dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kegiatan ekonomi melalui peningkatan produksi dan aktivitas usaha. Taqiyyuddin (2023) menemukan bahwa investasi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, Wahyudi et al. (2023) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya berkaitan dengan penambahan modal, tetapi juga dapat mendorong perkembangan kegiatan ekonomi yang membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian, kebijakan investasi perlu diarahkan pada sektor produktif yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas kesempatan kerja masyarakat lokal.

Meskipun investasi memiliki potensi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dampaknya tidak selalu sama pada setiap daerah dan sektor ekonomi. Surianto et al. (2023) misalnya, menemukan bahwa investasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Kota Parepare. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan investasi perlu diikuti dengan kebijakan pendukung, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan keterkaitan antara investasi dan ekonomi lokal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan peluang bagi tenaga kerja setempat melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Dengan sinergi investasi, pengembangan kompetensi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, investasi dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran.

3.4 Program Padat Karya Efektif sebagai Solusi Jangka Pendek Pengurangan Pengangguran

Program padat karya merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk menyediakan kesempatan kerja dalam jangka pendek, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap pekerjaan. Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung sehingga memberikan penghasilan sekaligus mendukung pembangunan lingkungan. Digdowiseiso et al. (2023) menunjukkan bahwa program padat karya memiliki dampak positif terhadap pengurangan pengangguran karena mampu menciptakan kesempatan kerja, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah dan masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, program padat karya dapat menjadi instrumen kebijakan yang relevan untuk memberikan pekerjaan sementara sekaligus membantu menjaga pendapatan masyarakat.

Efektivitas program padat karya juga terlihat dari kemampuannya melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Julihandono (2023) menemukan bahwa program padat karya dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan target yang direncanakan dan berperan dalam mengurangi pengangguran. Sementara itu, 'Izzah dan Hertati (2024) menunjukkan bahwa implementasi program padat karya di Kota Surabaya telah menyasar kelompok masyarakat yang membutuhkan serta mampu menjadi bagian dari strategi pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran, kapasitas pelaksana, serta dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program padat karya di daerah.

Meskipun memberikan manfaat dalam menyediakan pekerjaan, program padat karya pada dasarnya memiliki karakteristik jangka pendek sehingga belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan pekerjaan berkelanjutan. Digdowiseiso et al. (2023) mencatat bahwa salah satu tantangan program padat karya adalah sifat pekerjaan yang sementara sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan setelah program berakhir. Oleh karena itu, program padat karya perlu diintegrasikan dengan kebijakan jangka panjang, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, kewirausahaan, dan peningkatan investasi. Integrasi tersebut penting agar masyarakat tidak hanya memperoleh penghasilan sementara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan atau menciptakan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan setelah program selesai.

3.5 Efektivitas Kebijakan Masih Terhambat oleh Berbagai Kendala Implementasi

Meskipun berbagai kebijakan telah dirancang untuk mengurangi pengangguran, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala yang dapat mengurangi efektivitas program. Widodo et al. (2025) menemukan bahwa implementasi pelatihan kerja berbasis kompetensi masih menghadapi keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya peralatan praktik yang mutakhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan program, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran dapat membatasi jumlah peserta, kualitas fasilitas, dan keberlanjutan kegiatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan dukungan pembiayaan dan sumber daya agar program ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.

Kendala lainnya berkaitan dengan ketepatan sasaran, koordinasi, serta pemantauan pelaksanaan program. Artanti et al. (2024) menunjukkan bahwa program pelatihan kerja di Kota Batu telah berjalan cukup baik dan mampu meningkatkan keterampilan peserta, tetapi masih ditemukan persoalan dalam ketepatan sasaran karena sebagian peserta program telah memiliki pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya proses seleksi, sosialisasi, dan monitoring agar program benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, Setiawan dan Hikmah (2025) menekankan bahwa penanganan pengangguran membutuhkan strategi yang terintegrasi melalui

pelatihan kerja, pengembangan UMKM, dan investasi sektor industri. Koordinasi antarsektor menjadi penting agar berbagai kebijakan tidak berjalan secara terpisah.

Permasalahan lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program dengan kebutuhan pasar kerja dan keberlanjutan hasil kebijakan. Program pelatihan yang tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan industri dapat menyebabkan keterampilan peserta belum optimal untuk mendukung penempatan kerja. Widodo et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi perlu disertai monitoring dan evaluasi pascapelatihan serta peningkatan kolaborasi lintas sektor untuk mengetahui dampak program terhadap penempatan tenaga kerja. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu memperkuat pemetaan kebutuhan tenaga kerja, meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, melakukan evaluasi berkala, serta memastikan tindak lanjut setelah program selesai. Upaya tersebut diperlukan agar kebijakan pengurangan pengangguran tidak hanya menghasilkan program, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kesempatan kerja masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran di daerah melalui program yang berorientasi pada peningkatan kompetensi, penciptaan kesempatan kerja, dan penguatan ekonomi masyarakat. Program pelatihan kerja berkontribusi dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, sedangkan pengembangan UMKM mendorong penciptaan usaha dan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan investasi daerah juga berpotensi membuka lapangan kerja melalui perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Program padat karya dapat menjadi instrumen jangka pendek untuk menyediakan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat.

Namun, efektivitas kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, fasilitas, ketepatan sasaran, koordinasi antarlembaga, serta kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui pemetaan kebutuhan tenaga kerja, peningkatan kualitas pelatihan, penguatan UMKM, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pengembangan program padat karya yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan agar kebijakan tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi mampu

menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Anggraini, H. A., & Muchtolifah, M. (2023). Analisis pengaruh investasi dan inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Provinsi Bali. *Jurnal E-Bis*, 7(2), 500–513. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1294>
- Artanti, A. Y., Sihidi, I. T., Romadhan, A. A., & Kamil, M. (2024). Efektivitas program penanggulangan pengangguran melalui pelatihan kerja di Kota Batu. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 8(1), 41–55. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i1.8627>
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Digdownseiso, K., Fitasari, A., & Nastiyawati, N. (2023). Dampak dan efisiensi program padat karya sebagai belanja prioritas untuk mengentaskan pengangguran: Kajian literatur. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1980–1990. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.7491>
- Efendi, N. (2024). Digital business training as an effort to expand job opportunities graduates in Lampung Province. *Jurnal Puruhita*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.15294/puruhita.v6i1.75098>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hafni, R., & Rozali, A. (2015). Analisis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan/article/view/1034>
- Izzah, Z., & Hertati, D. (2024). Implementasi program padat karya dalam pengurangan pengangguran di Kota Surabaya: Sebuah analisis berdasarkan

- model David C. Korten. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 91–100. <https://doi.org/10.52423/neores.v6i1.316>
- Julihandono, C. J. (2023). Efektivitas dan efisiensi belanja prioritas program padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran di masa pandemi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 51–62. <https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.540>
- Nurfauziah, N., Albari, A., Suhartini, S., & Mulyati, S. (2024). Digitalisasi UMKM melalui program SiBakul Jogja dalam upaya peningkatan daya saing. *Rahmatan Lil 'Alamin Journal of Community Services*, 4(2), 57–66. <https://doi.org/10.20885/RLA.Vol4.iss2art1>
- Rum, Z. M., Mustafa, S., & Muhani, M. (2023). Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Selatan. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(2). <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i3.314>
- Rusdin, A. F., Madris, M., & Sabir, S. (2023). Analisis determinan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Mirai Management*, 8(2), 347–358. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai/article/view/5160>
- Saragi, D. R. R., & Sihombing, H. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(2), 1224–1233. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i2.3050>
- Setiawan, F., & Hikmah, N. (2025). Analisa kebijakan publik dalam upaya memecahkan masalah pengangguran di Kabupaten Deliserdang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(1). <https://doi.org/10.37304/jap.v11i1.19055>
- Silalahi, R., Masinambow, V. A. J., & Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh tingkat pendidikan dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara (studi pada kota-kota di Sulawesi Utara). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(8), 25–36.
- Taqiyyuddin, F. (2023). Analisis pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja melalui variabel Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(1), 95–105. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i01.23006>
- Utami, H. W., & Zafira, M. F. (2024). Efektivitas program pelatihan kerja bidang bisnis dan manajemen di Balai Latihan Kerja Surabaya dalam upaya pengentasan pengangguran di Kota Surabaya. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 5(1), 34–42. [https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5\(1\).34-42](https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(1).34-42)

- Wahyudi, W., Priyagus, P., & Kurniawan, E. A. (2023). Pengaruh investasi dan upah serta ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 20(1), 46–52. <https://doi.org/10.30872/jkin.v20i1.12910>
- Wangge, Y. B. R., & Anggrismono, A. (2024). Analisis penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, 7(1), 520–527. <https://doi.org/10.31004/jutin.v7i1.25920>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Widodo, R., Natsir, M., & Sulistyowati, A. (2025). Implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi upaya mengurangi pengangguran terbuka di Disperinnaker Kota Probolinggo. *JISP: Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 5(2), 82–89. <https://doi.org/10.38156/jisp.v5i2.366>
- Yuliasuti, A. (2024). Strategi peningkatan kesempatan kerja berbasis potensi wilayah: Evaluasi tenaga kerja mandiri pemula. *Journal of Social Movements*, 1(1), 70–84. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.4>